

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut (World Bank, 2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi tersebut juga berkaitan dengan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah fenomena urbanisasi. Urbanisasi dan penurunan kemiskinan merupakan dua aspek penting yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemiskinan memiliki sifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Individu yang hidup dalam kondisi miskin umumnya menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pekerjaan yang layak, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran kemiskinan (*poverty cycle*), yaitu suatu keadaan di mana kemiskinan yang dialami seseorang

akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya peluang ekonomi yang tersedia.

Tabel 1. 1 Kemiskinan Kota Cirebon (2010-2024)

No	Tahun	Kemiskinan (%)
1	2010	14,80
2	2011	14,60
3	2012	11,10
4	2013	10,54
5	2014	10,03
6	2015	10,36
7	2016	9,73
8	2017	9,66
9	2018	8,88
10	2019	8,41
11	2020	9,52
12	2021	10,03
13	2022	9,82
14	2023	9,16
15	2024	9,02

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2010-2024

Berdasarkan tabel 1.4 mengenai tingkat kemiskinan Kota Cirebon tahun 2010–2024, dapat diketahui bahwa secara umum angka kemiskinan mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan Kota Cirebon tercatat sebesar 14,80%, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 8,41% pada tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya efektivitas pembangunan dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah. Namun demikian, pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 9,52% dan naik lagi pada tahun 2021 sebesar 10,03%. Peningkatan tersebut diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang

menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah tahun 2021, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan secara bertahap, yaitu menjadi 9,82% pada tahun 2022, 9,16% pada tahun 2023, dan 9,02% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi serta membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon pascapandemi.

Tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah sering kali memiliki keterkaitan erat dengan dinamika mobilitas penduduk. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi internal suatu daerah, tetapi juga oleh pergerakan penduduk yang terjadi sebagai respons terhadap perbedaan kesempatan ekonomi antarwilayah. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, serta kurang optimalnya akses terhadap sumber daya ekonomi mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan perpindahan ke daerah yang dianggap memiliki prospek kehidupan yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas penduduk merupakan salah satu mekanisme adaptasi yang dilakukan individu maupun rumah tangga dalam menghadapi tekanan ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu bentuk mobilitas penduduk yang paling umum adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara maupun permanen. Migrasi umumnya dilakukan dengan tujuan memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih tinggi, akses pendidikan yang lebih baik, serta berbagai fasilitas sosial dan ekonomi yang lebih memadai. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, migrasi dipandang sebagai salah satu upaya rasional yang dilakukan individu untuk memaksimalkan kesejahteraan melalui pemanfaatan peluang yang tersedia di daerah tujuan. Keputusan untuk bermigrasi biasanya didasarkan pada pertimbangan perbandingan antara manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang harus ditanggung selama proses perpindahan.

Migrasi merupakan salah satu faktor penting terjadinya persebaran dan pemerataan penduduk. Berdasarkan batas wilayah yang dilewati, migrasi dibedakan menjadi migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk yang melintasi batas negara, sementara migrasi internal merupakan perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi (Leni, 2016) dalam (Astuti, 2023). Dari sudut pandang demografi, migrasi adalah salah satu dari tiga komponen dasar pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Apabila dibandingkan dengan faktor demografi lainnya seperti kelahiran dan kematian, migrasi cenderung mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat (Raman dan Bhagat, 2006) dalam (Astuti, 2023). Pada dasarnya migrasi yang dilakukan oleh individu merupakan migrasi yang dilakukan secara sukarela, di mana individu yang melakukan migrasi telah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perpindahan yang dilakukan. Termasuk juga memperhitungkan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh sebelum individu yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau tetap menetap di tempat asal.

Pembangunan yang terjadi hingga saat ini di Negara Berkembang salah satunya Indonesia masih menunjukkan ketimpangan pembangunan antara kota dengan desa, atau dapat dikatakan urban bias. Adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota tersebut menghasilkan ketimpangan kesejahteraan, dimana kesejahteraan kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Tidak semua aspek migrasi bermanfaat bagi negara berkembang. Migrasi dapat menimbulkan biaya tinggi bagi negara-negara berkembang dengan meninggalkan negara tanpa modal manusia yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelarian sumber daya manusia ini dapat menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi negara-negara berkembang karena para migran membawa nilai pelatihan mereka, yang seringkali disubsidi oleh pemerintah dengan sumber daya terbatas. Sementara migrasi berdampak pada pembangunan, kondisi ekonomi merupakan pendorong penting migrasi. Orang bermigrasi karena berbagai alasan termasuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, pendidikan, reuni keluarga dan melarikan diri dari kekerasan.

Orang sering bermigrasi untuk kombinasi dari ini dan alasan lainnya. Namun, kesenjangan pendapatan yang diharapkan antara negara maju dan berkembang adalah insentif yang kuat bagi orang untuk bermigrasi. Karena itu, migrasi memengaruhi pembangunan, tetapi pembangunan juga memengaruhi migrasi (Hidayat, 2020).

Tabel 1. 2 Migrasi Penduduk di Kota Cirebon (2010-2024)

No	Tahun	Migrasi Penduduk
1	2010	2.932
2	2011	2.959
3	2012	2.988
4	2013	3.017
5	2014	3.045
6	2015	6551
7	2016	3865
8	2017	3315
9	2018	3861
10	2019	6359
11	2020	2155
12	2021	4609
13	2022	6282
14	2023	8486
15	2024	8701

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2010-2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan perkembangan migrasi penduduk di Kota Cirebon selama periode 2010–2024. Secara umum, data tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan jumlah migrasi, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada periode awal (2010–2014), jumlah migrasi penduduk relatif stabil dan meningkat secara perlahan, dari 2.932 pada tahun 2010 menjadi 3.045 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk pada periode tersebut masih dalam kondisi normal dan terkendali. Namun, mulai tahun 2015 terjadi lonjakan signifikan menjadi 6.551,

yang kemudian diikuti fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016–2018, jumlah migrasi sempat menurun dan berada di kisaran 3.315 hingga 3.865. Setelah itu, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6.359. Tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup drastis menjadi 2.155, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi tertentu seperti pembatasan mobilitas (misalnya akibat pandemi). Akan tetapi, setelah tahun tersebut, jumlah migrasi kembali meningkat secara signifikan, yakni dari 4.609 pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 8.701.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Kota Cirebon mengalami peningkatan daya tarik sebagai daerah tujuan migrasi, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, peluang kerja, dan perkembangan wilayah perkotaan. Peningkatan migrasi ini berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai aspek, seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, serta tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, dinamika migrasi penduduk tersebut mencerminkan adanya perubahan mobilitas penduduk yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk terhadap tingkat kemiskinan dan dinamika pembangunan wilayah perkotaan di Kota Cirebon.

Migrasi penduduk dan urbanisasi merupakan dua fenomena demografis yang terus berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Sebagai kota strategis di jalur Pantura dan pusat perdagangan regional, Cirebon menjadi tujuan utama migrasi dari daerah sekitar seperti Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Urbanisasi yang terjadi di kota ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan jumlah penduduk tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan. Banyak migran yang tidak memiliki keterampilan memadai, sehingga berisiko menambah angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah perkotaan yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk akibat migrasi dan urbanisasi perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu,

pemahaman mengenai hubungan antara migrasi penduduk, urbanisasi, dan tingkat kemiskinan menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

Urbanisasi merupakan suatu proses transformasi wilayah yang bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aspek, antara lain demografi, sosial, ekonomi, serta karakteristik geografis suatu daerah. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan yang kemudian diikuti oleh perubahan struktur ekonomi, pola kehidupan masyarakat, serta perkembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin modern. Menurut Liu et al. (2014) dalam Hadijah dan Sadali (2020), urbanisasi tidak hanya merefleksikan perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan, tetapi juga menggambarkan proses pengkotaan (urban transformation) yang menyebabkan terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, urbanisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan perubahan sosial yang berlangsung dalam suatu wilayah. Umumnya, fenomena urbanisasi terjadi lebih intensif di negara-negara berkembang salah satunya seperti Indonesia (Chauvin et al., 2017) dalam (Hadijah & Sadali, 2020).

Urbanisasi yang terjadi di Kota Cirebon tidak hanya berdampak pada perluasan fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan ini mencakup pergeseran dari sektor agraris ke sektor informal dan jasa, serta meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, transportasi, dan sanitasi. Namun, urbanisasi yang tidak terencana dapat menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan kapasitas pelayanan publik kota. Peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan. Banyak migran yang datang tanpa keterampilan kerja yang memadai, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja perkotaan. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, terutama di kawasan permukiman informal. Studi oleh (Muliansyah & Chotib, 2019) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan migran di Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk lokal, terutama dalam aspek pendapatan dan akses layanan dasar.

Tabel 1. 3 Urbanisasi Kota Cirebon (2010-2024)

No	Tahun	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2010	165.770	162.748	328.518
2	2011	170.791	167.701	338.492
3	2012	179.275	176.112	355.387
4	2013	186.353	183.002	369.355
5	2014	193.998	190.197	384.195
6	2015	196.176	192.678	388.854
7	2016	162.862	161.932	324.794
8	2017	164.861	163.378	328.239
9	2018	169.139	168.447	337.586
10	2019	170.584	169.786	340.370
11	2020	172.117	170.886	343.003
12	2021	172.356	171.311	343.667
13	2022	173.756	172.682	346.438
14	2023	176.706	175.641	352.347
15	2024	178.969	177.660	356.629

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2010-2024

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Kota Cirebon berdasarkan jenis kelamin selama periode 2010–2024. Secara umum, data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah penduduk mengalami tren peningkatan dari waktu ke waktu, meskipun terdapat penurunan pada beberapa tahun tertentu. Pada periode 2010–2015, jumlah penduduk terus meningkat dari 328.518 jiwa menjadi 388.854 jiwa. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, yang dapat disebabkan oleh faktor kelahiran, migrasi masuk, maupun perkembangan wilayah perkotaan. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 324.794 jiwa. Setelah itu, jumlah penduduk kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap hingga mencapai 356.629 jiwa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan

bahwa setelah mengalami penurunan, pertumbuhan penduduk kembali stabil. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang setiap tahunnya, dengan jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini menunjukkan struktur penduduk yang cukup proporsional, sehingga tidak terdapat ketimpangan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah penduduk ini mengindikasikan adanya proses urbanisasi yang terus berlangsung di Kota Cirebon. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti kebutuhan lapangan kerja, penyediaan fasilitas publik, serta potensi peningkatan tingkat kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang memadai.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dalam suatu wilayah. IPM tidak hanya menilai keberhasilan pembangunan dari aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Badan Pusat Statistik menggunakan IPM sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan tingginya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai dapat menyebabkan rendahnya kompetensi tenaga kerja, tingginya tingkat

pengangguran, serta rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat menghambat laju pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pembangunan menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Temuan ini dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut terkait pengaruh migrasi dan urbanisasi terhadap kemiskinan serta peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi dalam konteks penelitian yang lebih luas. Dalam konteks pembangunan manusia, penting untuk menelaah bagaimana migrasi dan urbanisasi memengaruhi indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan capaian pembangunan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Penelitian oleh (Muliza et al., 2017) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan belanja publik memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di tingkat regional. Oleh karena itu, IPM dapat digunakan sebagai variabel moderasi dalam menganalisis hubungan antara migrasi, urbanisasi, dan kemiskinan di Kota Cirebon. Dengan pendekatan *kuantitatif*, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh migrasi dan urbanisasi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon, dengan IPM sebagai variabel moderasi. Metode kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan memungkinkan generalisasi temuan melalui analisis statistik.

Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait akan digunakan untuk membangun model regresi yang menguji hipotesis penelitian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk memahami kualitas pembangunan manusia secara komprehensif. Dalam konteks ini, IPM dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara migrasi dan urbanisasi terhadap kemiskinan. Dengan adanya variabel moderasi IPM, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh migrasi penduduk dan urbanisasi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon.

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon (2010-2024)

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
1	2010	70,74
2	2011	71,49
3	2012	71,97
4	2013	72,27
5	2014	72,93
6	2015	73,34
7	2016	73,70
8	2017	74,00
9	2018	74,35
10	2019	74,92
11	2020	74,89
12	2021	75,25
13	2022	75,89
14	2023	77,45
15	2024	78,09

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2010-2024

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tahun 2010–2024, terlihat bahwa IPM mengalami peningkatan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, nilai IPM Kota Cirebon tercatat sebesar 70,74 dan terus meningkat hingga mencapai 78,09 pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kota Cirebon, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai komponen utama penyusun IPM.

Peningkatan IPM yang stabil mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dari 74,92 menjadi 74,89, kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian

masyarakat. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya IPM kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren kenaikan IPM Kota Cirebon menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin membaik. Kondisi ini menjadi penting dalam penelitian karena peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat memengaruhi berbagai aspek sosial ekonomi, termasuk dalam mengurangi dampak negatif urbanisasi dan kemiskinan. Dengan demikian, IPM dapat dijadikan indikator yang relevan untuk melihat sejauh mana pembangunan manusia mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpotensi memperkuat daya saing suatu daerah sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan dalam memoderasi pengaruh migrasi penduduk dan proses urbanisasi terhadap kondisi sosial ekonomi. Dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, daerah diharapkan mampu mengelola arus migrasi dan laju urbanisasi secara lebih efektif, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diarahkan ke hasil yang lebih positif. Selain itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut dapat membantu mengurangi risiko pengangguran dan kemiskinan yang sering muncul akibat tingginya arus migrasi dan urbanisasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peta permasalahan yang muncul dari fenomena ini mencakup ketimpangan akses terhadap layanan dasar, tekanan terhadap infrastruktur, dan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kawasan urban. Kemiskinan di kota tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hidup yang tercermin

dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang dapat digunakan untuk memahami kualitas pembangunan manusia secara komprehensif. Dalam konteks ini, IPM berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara migrasi dan urbanisasi terhadap tingkat kemiskinan. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih menjadi salah satu pemicu utama kemiskinan di kawasan urban. Penelitian oleh (Lazuardi et al., 2025) menunjukkan bahwa masyarakat miskin di kota Medan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Ketimpangan ini dapat diukur menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Variabel seperti pengeluaran per kapita, jarak ke fasilitas publik, dan tingkat partisipasi sekolah dapat dianalisis dengan regresi logistik untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap status kemiskinan. Urbanisasi yang pesat menimbulkan tekanan besar terhadap infrastruktur kota, seperti transportasi, perumahan, dan sanitasi. Studi oleh (Shalehah et al., 2024) mengungkap bahwa ketimpangan pendapatan di 30 provinsi Indonesia berkorelasi dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan sosial. Tekanan infrastruktur dapat dianalisis melalui rasio rumah layak huni, dan akses transportasi. Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dan *Principal Component Analysis* (PCA) digunakan untuk mengukur kontribusi infrastruktur terhadap disparitas pendapatan dan kemiskinan. Kemiskinan di kota tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga oleh kualitas hidup yang tercermin dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Penelitian oleh (Watif et al., 2024) menyoroti bahwa ketimpangan sosial di masyarakat perkotaan sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas. Dimensi kualitas hidup dapat dikonstruksi dari angka harapan hidup, angka melek huruf, dan indeks harga konsumen. Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dapat digunakan untuk menguji hubungan antara kualitas hidup dan tingkat kemiskinan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara empiris dan lokal bagaimana migrasi dan urbanisasi memengaruhi kemiskinan,

serta bagaimana IPM dapat memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon dan sumber resmi lainnya. Dengan menggunakan teknik analisis regresi moderasi, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara statistik pengaruh migrasi dan urbanisasi terhadap kemiskinan, serta peran IPM sebagai variabel moderasi.

Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, karena sebagian besar studi sebelumnya hanya membahas hubungan antara IPM dan kemiskinan secara nasional atau provinsi, tanpa mengintegrasikan variabel migrasi dan urbanisasi secara simultan. Misalnya, (Hasibuan, 2023) meneliti pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Indonesia, namun tidak memasukkan aspek migrasi dan urbanisasi. (Syahputra, 2023) membahas pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, tetapi tidak mengkaji peran moderasi IPM dalam konteks lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk memahami bagaimana tekanan demografis akibat migrasi dan urbanisasi dapat memengaruhi distribusi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengaitkan proyeksi demografis dengan indikator kesejahteraan, penelitian ini memperluas cakupan analisis pembangunan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah literatur dengan mengintegrasikan variabel migrasi, urbanisasi, dan IPM dalam satu model kuantitatif yang komprehensif. Fokus pada Kota Cirebon sebagai studi kasus memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk mengurangi kemiskinan melalui intervensi yang mempertimbangkan dinamika spasial dan kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan konteks lokal untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat sejumlah masalah umum dan khusus yang dapat diidentifikasi.

Masalah Umum:

1. Urbanisasi dan migrasi di Kota Cirebon menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.
2. Urbanisasi yang tidak terencana menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur dasar dan kapasitas pelayanan publik.
3. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan memperburuk kondisi kemiskinan di kawasan urban.

Masalah Khusus:

1. Banyak migran yang datang ke Kota Cirebon tanpa keterampilan kerja memadai, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja dan berisiko menjadi miskin.
2. Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kualitas hidup belum banyak digunakan sebagai variabel moderasi dalam analisis hubungan antara migrasi, urbanisasi, dan kemiskinan.
3. Studi sebelumnya cenderung membahas IPM dan kemiskinan secara nasional atau provinsi, tanpa mengintegrasikan variabel migrasi dan urbanisasi secara simultan di tingkat kota.
4. Ketimpangan sosial dan disparitas pendapatan di kawasan urban berkorelasi dengan keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas hidup.
5. Belum ada penelitian kuantitatif yang secara komprehensif menguji pengaruh migrasi dan urbanisasi terhadap kemiskinan dengan IPM sebagai variabel moderasi di Kota Cirebon.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh migrasi dan urbanisasi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah administratif Kota Cirebon, dengan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi yang merepresentasikan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, di mana penelitian ini secara eksklusif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon serta sumber resmi lainnya yang relevan dalam rentang waktu antara tahun 2010 hingga 2024, dan membatasi

ruang lingkup pada migrasi penduduk dari wilayah sekitar seperti Indramayu, Majalengka, dan Kuningan ke Kota Cirebon sebagai bentuk migrasi regional, serta urbanisasi internal yang berdampak pada tekanan terhadap infrastruktur dasar, ketimpangan akses layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat urban, tanpa memasukkan variabel makroekonomi lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional, atau produk *domestik regional bruto* (PDRB), serta tidak mencakup wilayah administratif di luar Kota Cirebon, dengan fokus utama pada pengujian model regresi moderasi yang mengintegrasikan variabel-variabel tersebut secara simultan untuk memperoleh pemahaman empiris yang lebih mendalam mengenai dinamika kemiskinan dalam konteks pembangunan manusia di kawasan perkotaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Migrasi Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024?
2. Apakah Urbanisasi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024?
3. Apakah Migrasi Penduduk dan Urbanisasi Secara Simultan Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi Periode Tahun 2010-2024?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memoderasi pengaruh Migrasi Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memoderasi pengaruh Urbanisasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024?
6. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Memoderasi Migrasi Penduduk dan Urbanisasi secara Simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010--2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis pengaruh Migrasi Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024.
2. Menganalisis pengaruh Urbanisasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024.
3. Menganalisis pengaruh simultan Migrasi Penduduk dan Urbanisasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi Periode Tahun 2010-2024.
4. Menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh Migrasi Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024.
5. Menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh Urbanisasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024.
6. Menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh Migrasi Penduduk dan Urbanisasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Periode Tahun 2010-2024.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian demografi dan pembangunan manusia dengan mengintegrasikan variabel migrasi, urbanisasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam satu model kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan simultan antara dinamika demografis dan kemiskinan di tingkat kota, serta memperluas pemahaman tentang peran IPM sebagai variabel moderasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kota Cirebon dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami

pengaruh migrasi dan urbanisasi terhadap kemiskinan serta peran IPM dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, kebijakan pembangunan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban melalui intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini menawarkan pendekatan analisis regresi moderasi yang dapat direplikasi dalam studi-studi serupa di wilayah lain, serta mendorong penggunaan data sekunder resmi dalam pengujian empiris yang berbasis statistik. Model kuantitatif yang digunakan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji isu kemiskinan dan pembangunan manusia secara lebih terstruktur dan berbasis bukti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi yang berjudul *“Pengaruh Migrasi Penduduk dan Urbanisasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Variabel Moderasi di Kota Cirebon”*, pembahasannya disusun ke dalam lima bagian utama dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi gambaran umum penelitian serta alasan utama mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena atau persoalan yang melandasi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian, manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoretis dan praktis, serta batasan masalah yang memberikan ruang lingkup agar pembahasan tidak melebar. Di akhir bab, disajikan sistematika penulisan sebagai penjelasan singkat mengenai isi setiap bab dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan teori-teori, konsep-konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian. Bagian ini mencakup kajian teori yang menjadi dasar bagi variabel yang diteliti, ulasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual

yang menggambarkan hubungan logis antarvariabel, serta hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara dan akan diuji secara empiris, khususnya dalam penelitian kuantitatif.

BAB III Metodologi Penelitian

Menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilaksanakan. Uraianya meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel atau subjek penelitian beserta teknik pengambilannya, teknik pengumpulan data yang digunakan seperti kuesioner, wawancara, observasi, atau dokumentasi, instrumen penelitian yang berfungsi sebagai alat ukur variabel, dan teknik analisis data yang meliputi metode statistik maupun analisis lainnya sesuai kebutuhan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan temuan penelitian serta interpretasinya. Bagian ini mencakup deskripsi data yang menggambarkan karakteristik data yang diperoleh, hasil analisis data berdasarkan metode yang telah ditentukan, serta pembahasan yang menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak terkait berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh.